

Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Syafiqoh Nurhayati¹, Fitrawansyah², Didik Riyanto³

^{1,2,3} Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pertiwi

e-mail: syafiqoh3112@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta Periode 2018-2020. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan teknik sampel jenuh sebanyak 3 tahun. Hasil uji t didapat nilai signifikansi (Sig). $0,039 < 0,05$ dan nilai t hitung $> t$ tabel yakni $2,147 > 1,69236$ maka ada pengaruh PKB terhadap PAD atau hipotesis 1 diterima. Serta nilai signifikansi (Sig). sebesar $0,496 > 0,05$ dan nilai t hitung $< t$ tabel yakni $0,689 < 1,69236$ maka tidak terdapat pengaruh antara variabel BBNKB dengan variabel PAD atau hipotesis 2 ditolak. Uji F diperoleh nilai signifikan sebesar $0,011 < 0,05$ dan nilai F hitung $> F$ tabel yaitu $5,170 > 4,113$, maka seluruh variabel independen (PKB, BBNKB) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen (PAD) atau hipotesis 3 diterima. Koefisien determinasi diperoleh nilai R Square sebesar 0,239 atau 23,9%. Maka dapat diartikan bahwa variabel PKB dan BBNKB dapat mempengaruhi PAD sebesar 23,9% sedangkan sisanya sebesar 76,1% adalah variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam model penelitian ini.

Kata kunci: *Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah.*

Abstract

This study aims to test and analyze the effect of motor vehicle tax and motor vehicle title transfer duty on local revenue of DKI Jakarta Province for the 2018-2020 period. The research method uses quantitative methods with a saturated sample technique of 3 years. The t test results obtained a significance value (Sig). $0.039 < 0.05$ and the value of t count $> t$ table, namely $2.147 > 1.69236$, so there is an influence of PKB on PAD or hypothesis 1 is accepted. As well as the significance value (Sig). of $0.496 > 0.05$ and the value of t count $< t$ table, namely $0.689 < 1.69236$, so there is no influence between the BBNKB variable and the PAD variable or hypothesis 2 is rejected. The F test obtained a significant value of $0.011 < 0.05$ and the value of F count $> F$ table, namely $5.170 > 4.113$, then all independent variables (PKB, BBNKB) together (simultaneously) affect the dependent variable (PAD) or hypothesis 3 is accepted. The coefficient of determination obtained the R Square value of 0.239 or 23.9%. So it can be interpreted that the PKB and BBNKB variables can affect PAD by 23.9% while the remaining 76.1% are other variables not examined in this research model.

Keywords : *Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Title Transfer Fee And Local Revenue.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang menggunakan pajak sebagai salah satu pendapatan utama untuk membiayai segala macam kebutuhan, termasuk didalamnya yaitu untuk penanganan Pandemi Covid -19 yang sedang melanda diseluruh dunia. Dikutip dari (Antara News.com, 2021) "Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suhasil Nazara menekankan pajak merupakan tumpuan utama untuk membeli vaksin dan melaksanakan

vaksinasi bagi sekitar 185 juta masyarakat Indonesia dalam rangka mencapai herd immunity.” Tak hanya itu ia menyatakan pajak tidak hanya sekedar menjadi instrumen penerimaan negara melainkan juga memiliki peran tambahan yakni mendorong dunia usaha dalam kondisi pandemi seperti saat ini.

Menurut (Mardiasmo, 2016) Definisi pajak menurut Undang-Undang (UU) Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU No. 6 tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengelompokan pajak di Indonesia dapat ditinjau dari berbagai aspek, menurut golongan, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya. Berdasarkan lembaga pemungutnya pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pembagian pajak berdasarkan lembaga ini berdasarkan pada pemerintah yang berwenang memungutnya dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara atau daerah.

Semenjak diberlakukannya era otonomi daerah di Indonesia pada 1 Januari 2001 yang menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Dengan adanya hal tersebut setiap daerah memiliki hak dan kewajiban mengatur rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas baik dalam pemerintahan maupun pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah senantiasa memerlukan penerimaan yang dapat diandalkan.

Damas (2017:8) Pendapatan seringkali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah yang maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penerimaan PAD yang tinggi dari suatu daerah akan berdampak pada tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.”

DKI Jakarta sebagai ibukota Negara merupakan pemerintah daerah yang memiliki PAD paling besar di antara Provinsi lainnya di Indonesia. Dikutip dari situs ddtc.co.id didapatkan informasi bahwa menurut Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto, persentase realisasi pendapatan Provinsi di Indonesia rata-rata 47,55%, dengan 19 Provinsi melampaui rata-rata dan 15 lainnya di bawah rata-rata. Provinsi dengan persentase realisasi pendapatan terbesar adalah DKI Jakarta sebesar 64,9%. Diikuti Sumatera Barat 60,85% dan DI Yogyakarta 58,53%. Adapun Provinsi dengan realisasi pendapatan terendah yakni Papua 22,18%, Papua Barat 24,81%, dan Aceh 29,98%.

Menurut Kemenkeu, 2016 Pajak daerah menjadi salah satu penerimaan utama bagi pemerintah daerah sekarang ini. Pemberlakuan undang-undang tentang pemerintah Pajak daerah menjadi salah satu penerimaan utama bagi pemerintah daerah sekarang ini. Pemberlakuan undang-undang tentang pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing.

Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat daerah.”

Di era modernisasi masyarakat dalam beraktivitas berpindah-pindah tempat membutuhkan moda transportasi, salah satunya berupa kendaraan bermotor. Di kota besar seperti Jakarta, kepemilikan akan kendaraan bermotor sangatlah tinggi, hal ini didukung dari lembaga finance atau leasing yang memberikan kemudahan masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor (Parapat, 2021).

Data jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor 2017-2019

Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (unit) di Provinsi DKI Jakarta		
	2017	2018	2019
Mobil Penumpang	2 668 777	2 789 377	2 805 989
Bus	294 186	295 601	295 370
Truk	538 123	541 375	543 972
Sepeda Motor	7 773 511	8 136 410	8 194 590
Jumlah	11 274 597	11 762 763	11 839 921
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (unit) di Provinsi DKI Jakarta			
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (unit) di Provinsi DKI Jakarta			

Sumber: Data BPS DKI Jakarta.

Berdasarkan data statistik pada tabel diatas dapat dilihat kepemilikan kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kepemilikan kendaraan bermotor yang semakin bertambah diharapkan dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah dari masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor.

Menurut (Arinata, 2014) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu objek pajak yang diserahkan pengaturan dan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Dengan diberikannya kewenangan pengaturan dan pengelolaan PKB dan BBNKB kepada Pemerintah Daerah Provinsi, maka diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di berbagai daerah Provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada saat ini, dasar hukum pengaturan PKB dan BBNKB adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak kendaraan bermotor menurut Undang-undang peraturan daerah Nomor 28 tahun 2009, merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak kendaraan bermotor dilaporkan dalam Anggaran Belanja Daerah provinsi, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah Pajak kendaraan bermotor dibayarkan oleh masyarakat pemilik kendaraan bermotor setiap tahun. Pembayaran dapat dilakukan melalui kantor bersama SAMSAT yang dibentuk oleh pemerintah daerah di setiap wilayah.

Salah satu komponen dari pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, pajak yang dibayarkan setiap tahun oleh wajib pajak kendaraan bermotor ini merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak daerah. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan Susanto (2020), realisasi penerimaan pajak dan retribusi DKI Jakarta sejak Januari 2020 hingga 1 September 2020 mencapai Rp 17 triliun. Kepala Humas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Aris Firmansyah merinci, pendapatan pajak itu berasal dari 13 jenis pajak. Yaitu, pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp 5,13 triliun, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp 2,52 triliun yang merupakan urutan teratas.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih menjadi pendapatan tertinggi di ibukota meski pandemi Covid-19 melanda. Pemprov DKI Jakarta optimistis target pajak sebesar Rp30,93 triliun dapat terealisasi. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Mohammad Tsani Annafari mengatakan, berdasarkan refocusing pada Oktober 2020 lalu, target pendapatan pajak bertambah dari Rp29,3 triliun menjadi Rp30,93 triliun. Menurutnya, angka tersebut masih realistis dan pihaknya optimistis dapat menyelesaikan target pada akhir tahun ini. Realisasi per 4 November 2020 sebesar Rp26 triliun dan Pendapatan pajak tertinggi dari PBB-P2 dan PKB (Cahyono, 2020).

Dari laporan realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menunjukkan bahwa Pajak Daerah merupakan penyumbang terbesar pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 2. PAD DKI Jakarta 2017-2019

Jenis Pendapatan,	Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2015 - 2018		
	2019	2018	2017
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	45.701,57	43.327,14	43.901,49
1.1 Pajak Daerah	40.298,70	37.538,91	36.500,78
1.2 Retribusi Daerah	587,45	578,56	624,14
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	619,46	592,96	489,48
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	4.195,97	4.616,71	6.287,09
2. Dana Perimbangan	14.551,57	17.855,18	18.969,29
2.1 Bagi Hasil Pajak	11.585,30	15.026,20	16.605,61
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	113,09	183,38	241,88
2.3 Dana Alokasi Umum	-	-	-
2.4 Dana Alokasi Khusus	2.796,00	2.645,60	2.121,80
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	2.938,94	53,51	1.953,11
3.1 Pendapatan Hibah	2.042,68	53,51	1.953,11
3.2 Dana Darurat	-	-	-
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	57,18	0,00	0,00
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	839,08	0,00	0,00
3.6 Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	63.134,90	61.235,82	64.823,89

Sumber: Data BPS DKI Jakarta.

Menurut penelitian Nurul Aliah, Abu Bakar Hamzah, Muhammad Nasir yang berjudul “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Aceh”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten di Provinsi Aceh. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah relatif rendah, kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah lebih tinggi daripada kontribusi tarif Bea Balik Nama Kendaraan ke pendapatan asli daerah, sehingga Pemerintah Aceh harus bisa meningkatkan pendapatan daerahnya sendiri dengan menggali sumber-sumber penerimaan baru selain pajak kendaraan bermotor dan tarif transfer nama kendaraan bermotor. Selain dan menjadi keharusan yaitu peningkatan pendapatan asli daerah juga perlu dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam meningkatkan pajak kendaraan bermotor tarif transfer nama kendaraan bermotor.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi penelitian di Provinsi DKI Jakarta.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode atau desain kuantitatif, yaitu desain penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel independen yakni X terhadap variabel dependen yakni Y. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kuantitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan korelasional. Pendekatan jenis ini bertujuan untuk melihat apakah antara variabel memiliki korelasi atau tidak. Rumusan masalah dinyatakan dalam kalimat pertanyaan, selanjutnya peneliti menggunakan teori untuk menjawabnya.

Desain penelitian menghubungkan antara variabel X dan variabel Y. Dalam penelitian skripsi ini ada tiga variabel yaitu sebagai berikut:

1. Variabel bebas (X1) dalam hal ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Variabel bebas (X2) dalam hal ini adalah Bea Balik Nama Kendaraan bermotor.
3. Variabel terikat (Y) dalam hal ini adalah Pendapatan Asli Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta. Populasi pada penelitian ini adalah laporan realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor, realisasi pendapatan bea balik nama nomor kendaraan dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta selama 2018-2020. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2016:85). Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel bebas yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB) serta 1 (satu) variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2020 pada Tabel 7 berikut.

**Tabel 3. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi
DKI Jakarta
Tahun 2018-2020**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	8.350.000.000.000	8.553.632.204.643	102,44%
2019	8.800.000.000.000	8.844.155.231.721	100,50%
2020	8.000.000.000.000	7.879.175.181.468	98,49%

Sumber: Data diolah (2023).

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa target dan realisasi pajak kendaraan bermotor tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 yang mengalami penurunan baik dari realisasi dan target. Dapat dilihat pencapaian realisasi PKB adalah yang paling tinggi secara nominal pada tahun 2019 sebesar Rp.8.844.155.231.721 atau 100,50% dari target, dan pencapaian terendah pada tahun 2020 sebesar Rp.7.879.175.181.468 atau 98,49%. Realisasi persentase mulai turun pada tahun 2019 dan 2020, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid -19. Banyak masyarakat yang menunggak membayar PKB ditambah lagi adanya kebijakan insentif perpajakan untuk PKB dari Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yakni penghapusan sanksi denda keterlambatan pembayaran PKB.

Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Hasil Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2020 pada Tabel 4 berikut:

**Tabel 4. Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2020**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	5.100.000.000.000	5.350.625.602.850	104,91%
2019	5.650.000.000.000	5.403.535.434.750	95,64%
2020	3.700.000.000.000	3.669.362.320.550	99,17%

Sumber: Data diolah (2023).

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa target dan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan baik dari realisasi dan target. Dapat dilihat pencapaian

realisasi persentase BBNKB yang paling tinggi pada tahun 2018 sebesar Rp.5.350.625.602.850 atau 104,91% dari target, dan pencapaian terendah pada tahun 2019 yakni sebesar Rp.5.403.535.434.750 atau 95,64%.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Data yang didapatkan penulis terkait penerimaan PAD berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta yang telah di audit pada situs <https://ppid.jakarta.go.id/> dari tahun 2018-2020. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

**Tabel 5. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Target dan Realisasi Penerimaan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2018-2020**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	44.350.077.858.844	43.327.136.602.811	97,69%
2019	50.845.081.891.466	45.707.400.003.802	89,90%
2020	38.085.985.616.631	37.414.754.711.193	98,24%

Sumber: Data diolah (2023).

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa target dan realisasi PAD tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan. Dapat dilihat pencapaian realisasi persentase PAD yang paling tinggi pada tahun 2020 sebesar Rp.37.414.754.711.193 atau 98,24% dari target, sedangkan pencapaian terendah pada tahun 2019 sebesar Rp.45.707.400.003.802 atau 89,90%.

Statistik Deskriptif

Uji deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari penelitian. Pada penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan IBM SPSS Statistics 25 yang dapat memberikan gambaran dan informasi terkait dengan jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, mean dan standar deviasi dari variabel yang ada dalam penelitian ini. Hasil dari statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 10 berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PKB	36	439.972	931.074	702.139,00	104.672,247
BBNKB	36	163.299	532.897	400.653,47	103.999,333
PAD	36	1.121.269	6.703.285	3.048.119,42	1.283.419,147
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Output SPSS (2023).

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian sebanyak 36 observasi dengan penjelasan berikut.

1. Variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki nilai minimum sebesar 439.972 juta dan nilai maksimum sebesar 931.074 juta. Nilai rata-rata (mean) sebesar 702.139 juta dengan standar deviasi sebesar 104.672,247 juta. Nilai rata-rata diatas standar deviasi menunjukkan bahwa data tidak banyak variasi.
2. Variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memiliki nilai minimum sebesar 163.299 juta dan nilai maksimum sebesar 532.897 juta. Nilai rata-rata (mean) sebesar 400.653,47 juta dengan standar deviasi sebesar 103.999,333 juta. Nilai rata-rata diatas standar deviasi menunjukkan bahwa data tidak banyak variasi.
3. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum sebesar 1.121.269 juta dan nilai maksimum sebesar 6.703.285 juta. Nilai rata-rata (mean) sebesar 3.048.119,42 juta dengan standar deviasi sebesar 1.283.419,147 juta. Nilai rata-rata diatas standar

deviasi menunjukkan bahwa data tidak banyak variasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini regresi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh bebas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap variabel terikat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut adalah hasil uji regresi linear berganda.

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	-1321865.333			-.793.433		
1 PKB	1048348.830					
	4.926	2.295	.4022	147.039	.659	1.518
BBNKB	1.591	2.310	.129	689.496	.659	1.518

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Output SPSS (2023).

Berdasarkan hasil regresi linear berganda pada tabel diatas maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$PAD (Y) = - 1.048.348,830 + 4,926*PKB + 1,591*BBNKB + e$$

1. Konstanta (a) memiliki nilai sebesar -1.048.348,830. Hal ini berarti jika PKB (X1) dan BBNKB (X2) bernilai nol, maka nilai PAD (Y) mengalami penurunan sebesar 1.048.348,830 juta.
2. Koefisien regresi PKB memiliki nilai sebesar 4,926. Hal ini berarti jika setiap kenaikan PKB (X1) sebesar 1 juta dengan asumsi variabel yang lain konstan (0), maka nilai PAD (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 4,926 juta.
3. Koefisien regresi BBNKB memiliki nilai sebesar 1,591. Hal ini berarti jika setiap kenaikan BBNKB (X2) sebesar 1 juta dengan asumsi variabel yang lain konstan (0), maka nilai PAD (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 1,591 juta.

Uji t

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial/individual dalam menerangkan variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan nilai signifikansi (Sig.)
 - a. Jika nilai signifikansi (Sig). < probabilitas 0,05 maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima.
 - b. Jika nilai signifikansi (Sig). > probabilitas 0,05 maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis ditolak.
2. Berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel
 - a. Jika nilai t hitung > t tabel maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima.
 - b. Jika nilai t hitung < t tabel maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis ditolak.

Rumus untuk mencari nilai t tabel:

$$t_{\text{tabel}} = (\alpha; n-k-1 \text{ atau } df \text{ residual})$$

$$t_{\text{tabel}} = (0,05; 36-2-1)$$

$$t_{\text{tabel}} = (0,05; 33) = 1,69236$$

Tabel 8. Hasil Uji t Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.	Collinearity Statistics Tolerance VIF
	B	Std. Error				
(Constant)	1048348.830	-1321865.333				
¹ PKB	4.926	2.295	.4022	2.147	.039	.6591.518
BBNKB	1.591	2.310	.129	0.689	.496	.6591.518

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Output SPSS (2023).

Berdasarkan tabel diatas, dapat diambil keputusan bahwa:

Variabel PKB (X1) memiliki nilai signifikansi (Sig). sebesar 0,039 < 0,05 dan nilai t hitung > t tabel yakni 2,147 > 1,69236, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel PKB (X1) dengan variabel PAD (Y) atau hipotesis 1 diterima.

Variabel BBNKB (X2) memiliki nilai signifikansi (Sig). sebesar 0,496 > 0,05 dan nilai t hitung < t tabel yakni 0,689 < 1,69236, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel BBNKB (X2) dengan variabel PAD (Y) atau hipotesis 2 ditolak.

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan < 0,05 atau F hitung > F tabel maka secara simultan variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan > 0,05 atau F hitung < F tabel maka secara simultan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel distribusi F yang digunakan dalam penelitian ini dicari dengan $\alpha = 0,05$, $df (k-1) = 2-1 = 1$ dan $df (n-k-1) = 36-2-1 = 33$, maka tabel F menunjukkan nilai 4,113. Berikut tabel uji F yang diperoleh sebagai berikut.

Tabel 9. Hasil Uji F Simultan

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	13754701273374.250	2	6877350636687.1255	5.170	.011 ^b
Residual	43896063460766.484	33	1330183741235.348		
Total	57650764734140.734	35			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), BBNKB, PKB

Sumber: Output SPSS (2023).

Berdasarkan hasil uji F, diketahui bahwa nilai signifikan 0,011 yang berarti lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu 5,170 > 4,113. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen (PKB, BBNKB) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen (PAD) atau hipotesis 3 diterima.

Uji Koefisien Determinasi

Dalam penelitian ini, analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas terhadap variabel terikat.

**Tabel 10. Hasil Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.488 ^a	.239	.192	1153335.919	.781

a. Predictors: (Constant), BBNKB, PKB

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Output SPSS (2023).

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus KD maupun hasil output SPSS model summary didapatkan nilai R Square sebesar 0,239 atau 23,9%. Maka dapat diartikan bahwa variabel PKB dan BBNKB dapat mempengaruhi PAD sebesar 23,9% sedangkan sisanya sebesar 76,1% adalah variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam model penelitian ini.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil uji t yang menyatakan bahwa variabel PKB (X1) memiliki nilai signifikansi (Sig). sebesar $0,039 < 0,05$ dan nilai t hitung $> t$ tabel yakni $2,147 > 1,69236$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel PKB (X1) dengan variabel PAD (Y) atau hipotesis 1 diterima.

Hasil uji ini mendukung teori menurut Mardiasmo yang menyatakan bahwa pajak daerah yang salah satunya pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan pajak yang telah ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal ini dapat juga dipengaruhi oleh semakin meningkatnya kendaraan bermotor yang ada di daerah Provinsi DKI Jakarta, yang secara otomatis akan menambah jumlah pajak kendaraan tersebut yang akhirnya berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah itu yang menandakan pula bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak semakin tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Anggraeni Saputri dan Angga Jaya Saputra (2020) yang menyatakan bahwa berdasarkan uji parsial Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung tahun 2016-2018.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil uji t yang menyatakan bahwa variabel BBNKB (X2) memiliki nilai signifikansi (Sig). sebesar $0,496 > 0,05$ dan nilai t hitung $< t$ tabel yakni $0,689 < 1,69236$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel BBNKB (X2) dengan variabel PAD (Y) atau hipotesis 2 ditolak.

Bea balik nama kendaraan bermotor merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat terjadinya transaksi jual beli, warisan, tukar menukar, hibah dan lainnya. Hal ini akan berdampak pula pada pendapatan bagi daerah, namun setiap adanya transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas tidak selalu dibarengi dengan peralihan hak kepemilikan kepada pembeli sehingga transaksi jual beli itu tidak berdampak kepada pendapatan daerah di Provinsi DKI Jakarta.

Tinggi atau rendahnya pendapatan daerah terkait dengan bea balik nama kendaraan bermotor dipengaruhi oleh kepentingan pembeli untuk secara langsung melakukan balik nama, ditambah lagi dengan adanya aturan di DKI Jakarta dalam meningkatkan penerimaan pajak atas bea balik nama dari 10% menjadi 12,5% dimana tujuan menaikkan pajak ini

dimaksudkan untuk mengantisipasi kemacetan akibat banyaknya kendaraan yang ada di DKI Jakarta.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septiana Widya Ningsih, Anim Rahmayati (2018) yang menyatakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah serta penelitian yang dilakukan oleh Nimas Galuh Savitri dan Ary Yunita Anggraeni (2021) yang menyatakan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pajak kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil uji F, diketahui bahwa nilai signifikan 0,011 yang berarti lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu $5,170 > 4,113$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen (PKB, BBNKB) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen (PAD) atau hipotesis 3 diterima.

Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan salah satu objek sumber pendapatan daerah yang memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta.

Disadari dengan adanya peningkatan sumber pendapatan asli daerah, maka pembangunan daerah akan semakin berjalan lancar. Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah itu sendiri, dengan membayar pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor maka berdampak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya di Provinsi DKI Jakarta.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh signifikan terhadap PAD. Nilai nilai signifikansi (Sig). sebesar $0,039 < 0,05$. Hal ini berarti penerimaan pajak daerah dari pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu jumlah pemilik kendaraan bermotor di DKI Jakarta terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap kenaikan pajak kendaraan bermotor sehingga dapat meningkatkan penerimaan di DKI Jakarta.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Nilai signifikansi (Sig). sebesar $0,496 > 0,05$. Walaupun di DKI Jakarta jumlah pemilik kendaraan semakin banyak namun pemerintah daerah DKI Jakarta sedang memikirkan banyak cara untuk mengurangi kemacetan di Jakarta sehingga menaikkan BBNKB dari 10% menjadi 12,5%. Karena hal ini diduga banyak masyarakat yang tidak membalik nama kendaraannya saat membeli kendaraan bekas, serta banyak warga pendatang yang tidak mutasi pindah ke DKI Jakarta.
3. Berdasarkan hasil uji F, diketahui bahwa nilai signifikan 0,011 yang berarti lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu $5,170 > 4,113$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen (PKB, BBNKB) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen (PAD). Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan salah satu objek sumber pendapatan daerah yang memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.
- Atmaja, L. F. (2020). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Atas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI (JAMAK) Vol 1 (1), 2020 , 57 - 66.

- Cindy Yudhita Pramita Sari, H. P. (2020). PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA TERHADAP KINERJA DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Jurnal MEBIS (Manajemen dan Bisnis) - Vol. 5, No. 1, Juli 2020, , 24-30.*
- Dedi Suharyadi, R. M. (2019). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada BPRD Provinsi DKI Jakarta. *MONETER Volume 6 No. 2 Oktober 2019, 149-156.*
- Dwi Anggraeni Saputri, A. J. (2020). PENGARUH REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PERIODE TAHUN 2016-2018. *ACCOUNTING GLOBAL JOURNAL Vol. 4, No. 1 April 2020 , 36-58.*
- Fitri Rahmiyatun, E. D. (2020, April). Analisis Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 7, 88-97.*
- Fitri Rahmiyatun, E. D. (2020). Analisis Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Moneter: Vol.73 No.1.*
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- <https://jakarta.bps.go.id/>. (2021). Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (unit) di Provinsi DKI Jakarta 2018-2020.
- <https://news.ddtc.co.id/>. (2020, Agustus Kamis 13 Agustus). Rendah, Ini Data Terbaru Realisasi Pendapatan Daerah Secara Nasional.
- <https://ppid.jakarta.go.id>. (2021). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
- <https://www.antaranews.com>. (2021, Maret Senin 22 Maret). wamenkeu-uang-pajak-tumpuan-untuk-beli-vaksin-dan-vaksinasi.
- JANNAH, H. E. (2016). KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 10 No. 1 2016, 1-8.*
- Majid, J. (2019). Akuntansi Sektor Publik. Gowa: Pusaka Almaida, .
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mulyadi, M. (2016). Metode Penelitian Praktis : Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta: Publica Press-Anggota IKAPI Jakarta.
- Nimas Galuh Savitri, A. Y. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 - 2019. *JURNAL ILMIAH BISNIS DAN PERPAJAKAN Vol 3, No 1 (2021) , 1-10.*
- Nurul Aliah, A. B. (2019). PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) TERHADAP PAD ACEH. *JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK INDONESIA Volume 6 Nomor 1, Mei 2019, 33-49.*
- Septiana Widya Ningsih, A. R. (2018). PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK BAHANBAKAR KENDARAAN BERMOTOR TERHADAPPENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH. Seminar Nasional dan The 5th Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sri Mulyani, D. (2020). Panduan Penulisan Skripsi. Bekasi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiwi.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: CV.Alfabeta.
- Tjip Ismail, E. (2019). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Tuti Priyanti, A. N. (2019). ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK REKLAME DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009-2016). *Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang Vol.*

